



Siaran Pers

Badan Kerja Sama Antar-
Parlemen (BKSAP)
DPR RI

Sekretariat:
Ged. Nusantara III,
Lt. 4Jl. Jend. Gatot
Subroto Jakarta
10270 Indonesia

Website:
<http://ksap.dpr.go.id/>

Twitter:
[@bksapdprri](https://twitter.com/bksapdprri)

Instagram:
[@bksapdpr](https://www.instagram.com/bksapdpr)

YouTube:
[BKSAP DPR RI](https://www.youtube.com/BKSAP_DPR_RI)

BKSAP adalah Alat Kelengkapan Dewan yang dibentuk untuk menjadi ujung tombak Diplomasi Parlemen. BKSAP mempunyai fungsi untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negaralain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk berbagai organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan anggota parlemen. BKSAP juga menyampaikan saran atau rekomendasi kepada Pimpinan DPR terkait masalah kerja sama antar-parlemen.

Informasi lebih lanjut,
silakan menghubungi Biro
KSAP:
021-5715814
biro_ksap@dpr.go.id

Soal Kudeta Myanmar, Fadli Zon dan Tokoh Politik Kawasan Sebut ASEAN Impoten

Jakarta - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat (BKSAP DPR) Fadli Zon bersama lima tokoh politik ASEAN secara virtual mengadopsi pernyataan bersama terkait kudeta militer di Myanmar pada 1 Februari 2021 lalu. Pernyataan bersama itu mengkritik sikap ASEAN yang dinilai gagal mengambil langkah politik secara bersama-sama untuk menekan junta militer Myanmar.

“Peristiwa di Myanmar, sekali lagi, memamerkan ketidakmampuan pemerintah-pemerintah ASEAN dalam menyikapi krisis di kawasan,” ujar pernyataan yang dibacakan Sam Rainsy itu, pemimpin oposisi Kamboja.

Dalam beberapa dekade, sambung pernyataan itu, para anggota ASEAN telah kerap kali gagal melindungi rakyatnya dari pelbagai krisis seperti petaka kemanusiaan Rohingya dan pelecehan HAM. Ditambahkan pula bahwa ASEAN terjebak oleh doktrin keharusan memegang prinsip non-intervensi. “Doktrin itu mungkin dulu diperlukan. Namun itu sejak awal menjelma sebagai hambatan besar dan batu sandungan bagi pembangunan partisipasi demokrasi dan perlindungan hak-hak dasar masyarakat ASEAN,” tegas pernyataan yang bertajuk *ASEAN Needs a New Vision to End the Myanmar Killings* itu.

Disampaikan juga bahwa semua penandatanganan pernyataan itu mendesak negara anggota ASEAN untuk meninggalkan doktrin non-intervensi yang sudah usang itu dan segera menjatuhkan sanksi perdagangan dan ekonomi terhadap junta militer. ASEAN kemudian didesak bersatu dan mengirimkan pesan tegas kepada junta militer agar secepatnya membebaskan semua tahanan politik, mengembalikan situasi politik seperti sebelum 1 Februari 2021, dan menghormati suara rakyat dalam pemilu November 2020 lalu. “Semua yang bertanggung jawab atas pembunuhan rakyat yang tak berdosa harus diadili,” desak pernyataan itu sembari mendesak penanggulangan keanggotan Myanmar di ASEAN.

Menanggapi pernyataan bersama tersebut, Fadli menilainya sebagai sikap perorangan. “Memang pernyataan ini terlihat sebagai sikap pribadi yang tidak akan mengubah situasi secara langsung. Namun itu sikap tokoh penting politik ASEAN. Itu harus didengarkan sebagai aspirasi masyarakat di kawasan,” tegas anggota Komisi I itu.

Lebih jauh pria berdarah Minang itu menilai bahwa pernyataan bersama tersebut sepenuhnya sejalan dengan sudut pandang resmi yang dikeluarkan oleh BKSAP DPR. “BKSAP mendesak ASEAN untuk menerapkan pendekatan yang lebih progresif dan dinamis dalam menafsirkan prinsip non-interferensi. Prinsip ini harus dikaitkan dengan pemahaman tentang tanggung jawab bersama negara-negara anggota ASEAN dalam menjalankan prinsip-prinsip dan nilai-nilai bersama seperti yang tertuang dalam Piagam ASEAN, seperti demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, pemerintahan yang baik, supremasi hukum, dan pemerintahan konstitusional,” beber legislator dari Dapil Jawa Barat V itu.

Pada sisi lain, politisi Gerindra itu berpendapat bahwa selama puluhan tahun prinsip non-intervensi ASEAN telah dieksploitasi sebagai alasan untuk tidak bertindak dalam menangani krisis kemanusiaan regional seperti genosida Rohingya. Pria yang mantan aktivis itu menilai bahwa situasi yang terjadi di Myanmar berada di bawah ketentuan *R2P (right to protect)* Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Terkait pelajaran krisis di Myanmar, Fadli menilai sebagai anugerah terselubung bagi ASEAN untuk melakukan introspeksi, reformasi, dan perampingan jika diperlukan. “Saya tegaskan kembali, ASEAN sangat membutuhkan langkah-langkah reformatif,” pungkask dia. Untuk diketahui, pernyataan bersama itu ditandatangani oleh Sam Rainsy (pemimpin oposisi Kamboja), Fadli Zon, Anwar Ibrahim (pemimpin oposisi Malaysia), Francis Panglinan (senator Filipina), Charles Chong (mantan anggota parlemen Singapura), dan Kasit Piromya (mantan Menteri Luar Negeri Thailand).